

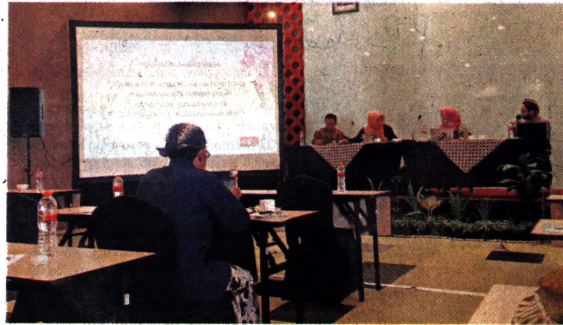


BIRO TAPEM SETDA DIY **Ajak Kapanewon-Kalurahan Sukseskan Pemilu 2024**

YOGYA (KR) - Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menggelar Sosialisasi Peran Aparatur Pemerintahan Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Dalam Pemilu 2024 di Hotel Khas Malioboro, Yogya, Kamis (17/11). Kegiatan ini diikuti perwakilan kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan di seluruh DIY.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Tapem Setda DIY Nur Legawa mengatakan, salah satu kunci sukses Pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Termasuk adanya pengawasan agar Pemilu dapat berjalan damai dan berintegritas.

"Kali ini yang menjadi sasaran kita adalah perwakilan dari kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan di seluruh DIY. Harapannya mereka



Pembicara dalam Sosialisasi Peran Aparatur Pemerintahan Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Dalam Pemilu 2024.

juga mendorong masyarakat untuk aktif menggunakan hak pilih," katanya.

Ditambahkannya, aparaturnya Pemerintahan Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan yang notabene adalah ASN tentu harus

netral dalam Pemilu. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota

dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Adapun aparaturnya

rintahan Kalurahan dimana di dalamnya adalah lurah, pamong kalurahan dan Anggota Badan Pemusyawaratan

Kalurahan juga menjadi perhatian khusus terkait netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilu seperti yang tercantum dalam Pasal 29, 51, dan 64 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.

"Bahwa lurah dan pamong kalurahan dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah," jelasnya.

*** Bersambung hal 7 kol 4**

Ajak

Sosialisasi menghadirkan Anggota Komisi A DPRD DIY M Syaifi, Ketua Bawaslu DIY Sutrisnowati dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY Siti Ghoniyatun.

M Syaifi mengatakan, dalam setiap pelaksanaan Pemilu diharapkan dapat mengubah kondisi bangsa ke arah lebih baik. Apalagi dana yang digelontorkan sangat besar, mencapai puluhan triliun rupiah.

"Ini sangat besar. Jangan sampai hasilnya hanya menyalakan konflik saja.

Menjadi PR bersama bagaimana kita bisa menghilangkan kata konflik dalam benak," ujarnya.

Dari KPU DIY lebih banyak menjelaskan tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan badan ad hoc ada beberapa yang harus diperbaiki.

"Kriteria persyaratan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan

Pemilu dan pemilihan serta mengakomodasi rekomendasi evaluasi pembentukan sebelumnya. Selain itu juga perlu adanya standarisasi proses pembentukan pada skala nasional untuk level PPK, PPS dan KPPS agar dapat mengupayakan kualitas yang sama," urainya.

Sementara itu tujuan pengawasan Pemilu dalam hal ini Bawaslu adalah

menegakkan integritas Pemilu. Termasuk mewujudkan keadilan Pemilu dan memastikan terselenggaranya Pemilu secara Luber Jurdil serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. "Ada tiga tugas utama Bawaslu, pengawasan, pencegahan dan penindakan," jelasnya.

(Awh)-f

Sambungan hal 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005